



SUKSES
JAKARTA
UNTUK
INDONESIA

Sosialisasi Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK)

Disampaikan pada kegiatan rakor

kediklatan satu pintu

Selasa, 15 Agustus 2023





1.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat 3 yang menyatakan bahwa :

1. Setiap Aparatur Sipil Negara memiliki hak yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi
2. Perangkat Daerah WAJIB untuk Menyusun Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi

2.

Permendagri 11 Tahun 2018 Pasal 61 Ayat 2 dan Perka LAN 10 Tahun 2018 tentang Perencanaan bangkom disusun berdasarkan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK)

- **AKPK untuk jenis penyelenggaraan pengembangan kompetensi tahun 2025 dan 2026 :**



Pendidikan (Tugas Belajar)

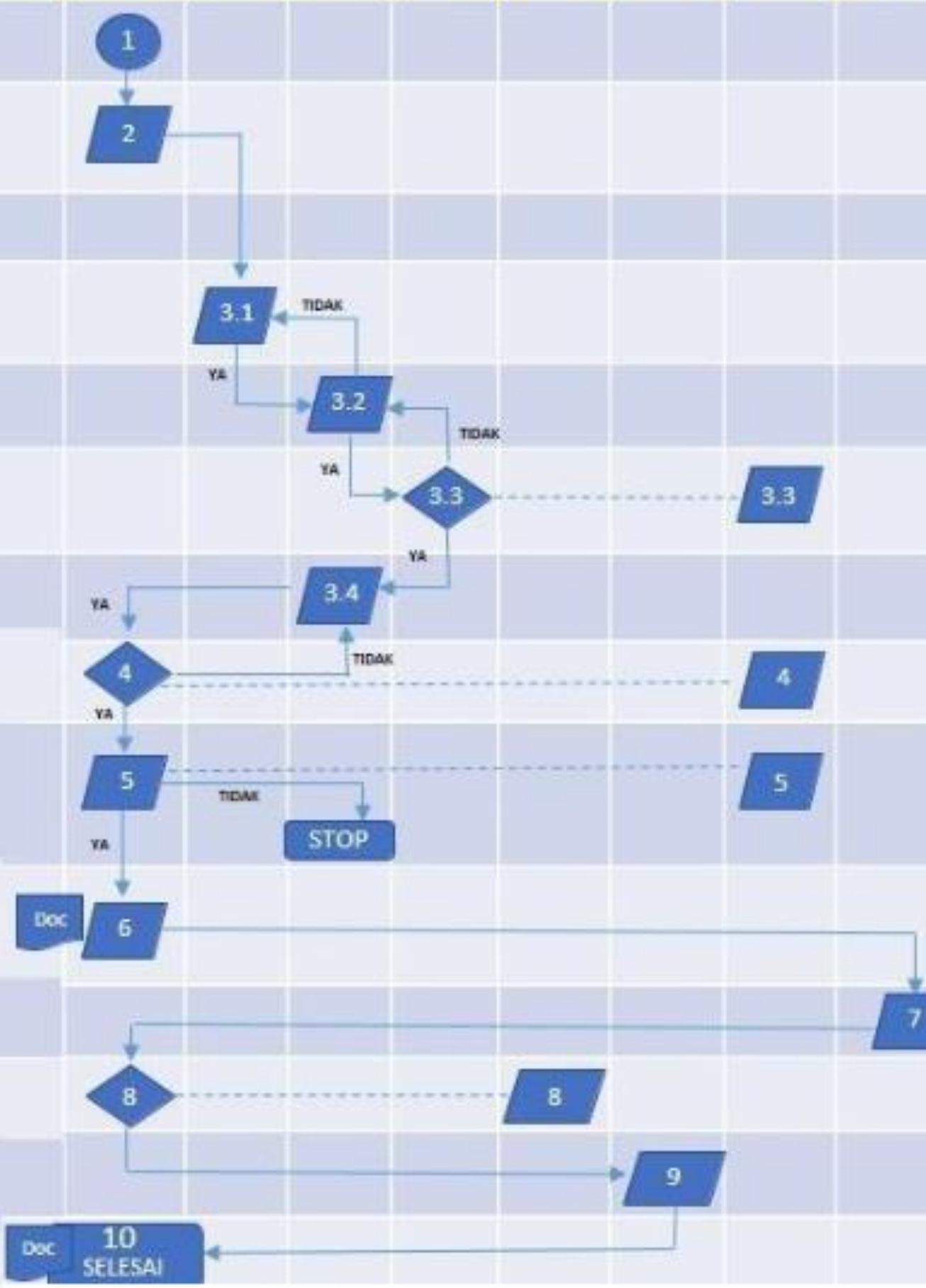


Pelatihan

- **Dasar untuk penerbitan rekomtek pelatihan (hanya untuk kompetensi teknis) perangkat daerah**
- **Input hasil AKPK melalui aplikasi Musrenbangkom pada Simdiklat (Jadwal Sosialisasi Kepada Perangkat Daerah/PD : 28-30 Agustus 2023)**

ALUR PROSES BISNIS

Tanggal Pelaksanaan	Uraian	Tim AKPK	Admin UKPD	Admin PD	Kepala PD	Kepala BPSDM	UPT Pusdatin BPSDM	Wali Program	Bidang Penyelenggara Bangkom
Juli-Agustus 2023	1. Membuat Surat Edaran BPSDM membuat surat edaran yang menyatakan dimulainya tahapan pengajuan usulan Bangkom	1							
4 Agustus & 28-30 Agustus 2023	2. Membuka Tahapan Usulan <ul style="list-style-type: none"> Entry Katalog Bangkom Peperan Teknis input Sistem kepada Admin PD/UKPD 	2							
31 Agustus-3 Oktober 2023	3. Mengajukan Usulan Pengajuan usulan Pengembangan Kompetensi dengan bisnis proses sbdr:								
	3.1 Usulan dari UKPD <ul style="list-style-type: none"> Admin UKPD mengusulkan Bangkom Usulan UKPD akan terkirim ke Admin PD terlebih dahulu untuk dikompilasi dan diverifikasi internal 	3.1							
	3.2 Usulan dari PD <ul style="list-style-type: none"> Admin PD mengajukan usulan Bangkom Admin PD melanjutkan usulan UKPD dan usulan yang ada di unit Eselon 2 kepada Kepala PD 	3.2							
	3.3 Validasi Usulan oleh Kepala PD <ul style="list-style-type: none"> Kepala PD melakukan verifikasi yang dikirimkan oleh Admin PD Perangkat Daerah melanjutkan usulan PD dan UKPD yang telah diverifikasi untuk dilanjutkan kepada Admin PD 	3.3							
	3.4 Cetak dan Unggah Surat Usulan	3.4							
4-6 Oktober 2023	4. Verifikasi lanjutan oleh BPSDM Penyelenggara BPSDM melakukan verifikasi lanjutan yang dikirimkan oleh PD, usulan yang ditolak akan dikembalikan ke PD dan UKPD untuk diperbaiki jika diperlukan (Indikator: Deadline Waktu dan Aspek Formil)	4							
9-20 Oktober 2023	5. Pembahasan One on One Meeting BPSDM Bersama PD membahas usulan Bangkom yang telah diajukan.	5							
Minggu Pertama November 2023	6. Musrenbangkom/LCM (Learning Council Meeting) <ul style="list-style-type: none"> Cetak Berita Acara Pembahasan Musrenbangkom Berdasarkan skala prioritas pada tahun berjalan dan berdasarkan rumpun kompetensi Usulan insidental dari pimpinan Musrenbangkom 	Doc 6							
	7. Penempatan Jadwal Bidang penyelenggara rencana Bangkom memberikan jadwal pelaksanaan Bangkom	7							
	8. Penetapan Usulan Kepala BPSDM menerbitkan SK Kalender Bangkom pada tahun berjalan	8							
	9. Posting usulan SIMDIKLAT Penyelenggara UPT Pusdatin BPSDM melakukan posting usulan yang telah disetujui pada Musrenbangkom ke aplikasi SIMDIKLAT	9							
	10. Membuat Surat Keputusan Gubernur Usulan yang telah ditetapkan selanjutnya disahkan melalui Surat Keputusan Gubernur.	Doc 10 SELESAI							





Formulir Deskripsi Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi



Unit Kerja Pengusul

(diisi nama unit kerja eselon II)

Usulan Pengembangan Kompetensi

(diisi judul bangkom yang diusulkan)

Deskripsi Diagnosa Kebutuhan Pembelajaran

Diisi penjelasan singkat mengapa pengembangan kompetensi yang diusulkan diperlukan oleh OPD pengusul, misal:

- § Adanya gap kuantitas: misal jumlah SDM bendahara saat ini ada 2 orang sementara yang dibutuhkan ?? orang, sehingga diperlukan tambahan sebanyak ? orang. Gap disebabkan karena SDM yang ada mutasi, pensiun, meninggal, dsb.
- § Adanya gap kualitas: misal tantangan penilaian property di Jakarta makin kompleks dengan adanya gedung, bangunan bawah tanah, pulau hasil reklamasi, jalan layang dsb. sehingga membutuhkan peningkatan kualitas kompetensi SDM yang ada.
- § Adanya target strategis pimpinan berupa program XXX yang dalam pelaksanaannya membutuhkan SDM dengan kompetensi YYY, sehingga diusulkan XXX

Target Strategis Pengembangan Kompetensi

Diisi penjelasan apa tujuan strategis yang menjadi dasar/berkaitan dengan pengusulan pengembangan kompetensi, misal: Melalui peningkatan jumlah dan kompetensi SDM dalam bidang pemeriksaan pajak diharapkan target peningkatan kepatuhan wajib pajak, khususnya pajak self-assessment dapat meningkat menjadi 95 % dalam 5 tahun, target RKPT tahunan dapat terpenuhi 100 %, annual audit coverage ratio/cakupan area pemeriksaan tahunan bisa mencapai 5% dari populasi wajib pajak.

Sasaran Pengembangan Kompetensi

Diisi jumlah dan profil SDM yang menjadi sasaran pelatihan, misal: 15 pejabat pengelola barang

Bentuk dan durasi pengembangan kompetensi

Diisi bentuk pengembangan kompetensi yang diusulkan, misal Pelatihan berbasis praktek lapangan/corpu – 2 bulan dengan system on (5 hari) dan off (55 hari), Bimbingan Teknis secara online selama 2 hari

Usulan jadwal pelaksanaan

Juni – Juli 2025

TEMPLATE FORMULIR DESKRIPSI AKPK

- Tersedia di aplikasi Musrenbangkom pada Simdiklat



Data Pendukung AKPK

- RPD 2023–2026
- Renstra
- Sasaran Kinerja
- Indikator Kinerja Utama
- SOTK (Uraian Tugas PD dalam Pergub 57 tahun 2022)
- Peta Jabatan Terbaru yang sudah di Tanda tangani Biro ORB
- Rekapitulasi profil seluruh PNS di masing-masing PD



WAJIB diinput di dalam link berikut ini:

<https://bit.ly/DataPerangkatDaerahMusren2023>



Maksimal Jumat, 18 Agustus 2023

THANK YOU!

Any Question



bpsdm

Provinsi DKI Jakarta



JakCorpU
Cepat Tepat Menuju Terdepan